

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dewasa ini Indonesia merencanakan berbagai program pembangunan yang salah satunya difokuskan di kawasan Danau Maninjau. Danau ini merupakan salah satu danau vulkanik terindah yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas permukaan 99,5 km² dengan kedalaman maksimum mencapai 495 meter. Keberadaan danau ini telah membentuk pola permukiman konsentris masyarakat Minangkabau, dengan 23 dari 26 nagari di kawasan Maninjau terletak pada elevasi 460-500 mdpl (BPS Kabupaten Agam, 2021). Pola ini sesuai dengan konsep "*tapian*" dalam budaya Minang yang memandang danau sebagai sumber kehidupan (Navis, 1984: 102).

Secara geografis, Danau Maninjau dikelilingi oleh tebing kaldera curam dengan kemiringan 35–60° dan ketinggian 460–550 mdpl (Barber et al., 2005:113). Danau ini memiliki nilai ekologis sebagai habitat 11 spesies ikan endemik, termasuk ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) yang hanya ditemukan di perairannya (Hadiaty et al, 2002:48). Masyarakat setempat menyebut ikan bilih sebagai "*Rinuak*" dan memanfaatkannya sebagai sumber protein utama dengan produksi mencapai 2,4 ton/tahun (Nofrita et al., 2018:117). Secara sosial budaya, ikan bilih tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas

masyarakat Minangkabau di sekitar danau, yang tercermin dalam berbagai tradisi kuliner dan upacara adat setempat.

Danau Maninjau memiliki fungsi ekologis sebagai ekosistem air tawar yang penting sekaligus berperan krusial dalam aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, danau Maninjau mendukung 78% mata pencaharian masyarakat di 9 kecamatan sekitarnya dengan produksi perikanan tahunan mencapai 5.832 ton pada tahun 2021. Dalam sektor perikanan, keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau merupakan penghasil ikan terbesar di Kabupaten Agam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) kabupaten Agam, Rosva Deswira, pada Jumat 28 Maret 2025 menyampaikan bahwa dari total 23.359 petak KJA, sekitar 15.000 masih aktif digunakan dengan produktivitas rata-rata mencapai 30 ton ikan per hari (Sumbarsatu.com, 2025).

Tabel 1:
Data Produksi Budidaya di KJA Kabupaten Agam Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Produksi Budidaya di KJA	Jumlah KJA
1.	2020	11.246,84 Ton	12.310 Unit
2.	2021	16.364,61 Ton	17.290 Unit
3.	2022	24.667,11 Ton	23.359 Unit
4.	2023	10.822,37 Ton	23.359 Unit
5.	2024	12.451,70 Ton	23.359 Unit

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2024

Dalam beberapa dekade terakhir, Danau Maninjau mengalami perubahan ekologi yang signifikan akibat eksplorasi sumber daya alam. Pertumbuhan pesat industri keramba jaring apung (KJA) yang tidak terkendali menjadi faktor utama

degradasi lingkungan, sekaligus mengubah struktur sosial ekonomi masyarakat pesisir danau. Kepadatan Keramba Jaring Apung (KJA) di danau ini telah mencapai 14.216 unit, melampaui 137% dari daya dukung ekologi maksimum yang hanya 6.000 unit sesuai rekomendasi Pusat Penelitian Limnologi LIPI (Wirasatriya et al, 2022). Kondisi ini diperparah oleh penurunan kualitas air yang tercermin dari penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) dari 78 (kategori baik) pada 2010 menjadi 52 (kategori sedang) pada 2022 dalam laporan pemantauan kualitas air danau Maninjau oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Di samping tekanan dari sektor perikanan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA), pemukiman sekitar Danau Maninjau menyumbang limbah padat sekitar 7,55 ton/tahun, sedangkan sektor pertanian menyumbang limbah sekitar 5,08 ton/tahun (Nontji, 2016). Kondisi beban limbah di Danau Maninjau melampaui kapasitas daya tampung lingkungan yang ditetapkan sebesar 9,2 ton berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2021 tentang daya tampung pencemaran danau. Angka ini menunjukkan bahwa pencemaran dari limbah domestik sudah melewati batas aman bagi kualitas air Danau Maninjau.

Salah satu dampak ekstrem dari akumulasi limbah dan penurunan kualitas air adalah munculnya fenomena *tubo belerang*. *Tubo* merupakan istilah masyarakat lokal untuk menyebut umbalan atau *upwelling*, yaitu kondisi naiknya massa air dari lapisan dasar ke permukaan akibat adanya perbedaan suhu. Hal ini terjadi pada saat

awal musim penghujan dengan intesitas tinggi sehingga suhu permukaan rendah akibatnya bagian bawah yang lebih hangat naik ke permukaan (Devi, et al, 2021:36). Oleh karena itu materi organik yang berasal dari pakan ikan dan sisa metabolisme naik dan mengganggu asupan oksigen sehingga mengakibatkan ikan keracunan dan berujung pada kematian. Fenomena *tubo belerang* menunjukkan betapa pentingnya menjaga kualitas air danau untuk mencegah dampak ekologis yang merusak dan merugikan.

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang melampaui daya dukung Danau Maninjau, Pemerintah Kabupaten Agam bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluncurkan Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA). Program ini sebagai salah satu implementasi dari Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2019 tentang Revitalisasi Ekosistem Danau Maninjau (Pemkab Agam, 2019) dengan tujuan mengalihkan ketergantungan masyarakat dari budidaya KJA ke kegiatan ekonomi berkelanjutan. Inisiasi program mata pencaharian alternatif didasarkan pada temuan Balai Riset Perikanan Perairan Umum (BRPPU) Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Laporan Kajian Daya Dukung Ekosistem Perairan Danau Maninjau tahun 2018 yang menyatakan:

1. Indeks pemanfaatan ruang perairan telah mencapai 214% dari daya dukung
2. Akumulasi limbah organik mencapai 12,8 ton/hari
3. Penurunan kualitas air dengan kadar oksigen terlarut <3 mg/L

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam menginisiasi program MPA seperti menangkap ikan ramah lingkungan dan pelatihan budidaya

ikan di darat, seperti sistem bioflok dan budidaya ikan menggunakan terpal (RRI, 2023). Selain budidaya ikan, ada pengembangan usaha dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata ramah lingkungan, seperti wisata perairan, sejarah, edukasi, religi, olahraga dan wisata alam di beberapa desa/nagari sekitar danau (Osronita, et al.2021). Transformasi ekonomi juga diarahkan ke sektor perkebunan dengan pemberian bibit tanaman seperti pala, damar dan buah-buahan, serta pelatihan budidaya ikan lele dan ternak sebagai alternatif penghasilan (ANTARA SUMBAR, 2019)

Pada tanggal 26 Desember 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat menyerahkan bantuan berupa 33 unit perahu *fiberglass*, 33 unit mesin *long tail* 8,3 PK dan 33 unit gillnet kepada nelayan di sekitar Danau Maninjau. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, sebagai bagian dari program Mata Pencarian Alternatif (MPA) untuk mendukung transisi dari budidaya keramba jaring apung (KJA) ke sistem perikanan tangkap yang lebih ramah lingkungan (Dwipa News, 2022). Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya menegaskan bahwa pembongkaran KJA secara sukarela akan diberikan bantuan ekonomi yang lebih besar sebagai bentuk transisi menuju perikanan tangkap yang ramah lingkungan.

Implementasi program ini menunjukkan hasil yang signifikan, dimana hingga akhir tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mencatat sebanyak 88 petak KJA telah berhasil dibongkar secara sukarela oleh 33

pemilik KJA (Padek, 2022). Sebagai bentuk kompensasi, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan berbagai insentif ekonomi kepada pelaku usaha KJA yang bersedia mengurangi atau membongkar kerambanya. Kebijakan ini merupakan upaya konkret untuk mengurangi tekanan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Danau Maninjau. Upaya ini tidak hanya dilihat sebagai solusi ekologis untuk menyelamatkan kualitas air danau, namun program MPA juga menjadi bagian dari strategi revitalisasi danau dan pengembangan ekowisata sebagai sumber ekonomi baru masyarakat.

Meskipun program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) memiliki tujuan yang jelas dan strategi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada Keramba Jaring Apung (KJA), pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Respons masyarakat terhadap program ini sangat beragam, mencerminkan dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang kompleks. Seperti terlihat dalam aksi penolakan dari puluhan petani KJA di Danau Maninjau, pada 14 Juni 2021 yang menyatakan keberatan terhadap pengurangan KJA karena menganggapnya sebagai ancaman terhadap mata pencaharian mereka (ANTARA SUMBAR, 2021). Resistensi yang muncul bukanlah penolakan mutlak, melainkan bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Danau Maninjau bukan sekadar hamparan air yang memesona, melainkan ruang hidup yang menyimpan ketegangan antara kelestarian alam dan daya hidup masyarakat. Studi etnografi menunjukkan bahwa Keramba Jaring Apung (KJA)

telah menjadi nadi perekonomian warga sekaligus sumber konflik ekologis yang pelik (Yonariza et al., 2021: 15). Ketika pemerintah berupaya mengurangi KJA melalui program Mata Pencaharian Alternatif (MPA), respons masyarakat justru mengkristal dalam bentuk penolakan yang menegaskan betapa kebijakan lingkungan seringkali berbenturan dengan realitas sosial ekonomi di lapangan. Di Maninjau, berbagai program pelatihan seperti pengembangan pariwisata dan pertanian organik belum mampu mengantikan pendapatan masyarakat dari usaha Keramba Jaring Apung (KJA). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap modal usaha, teknologi serta pasar yang mendukung keberlanjutan alternatif mata pencaharian tersebut (Nurfatriani et al., 2015). Di sisi lain, narasi penyelamatan danau kerap didominasi oleh pemerintah dan ilmuwan, sementara suara masyarakat yang paling memahami dinamika danau justru tersisihkan.

Penelitian ini berangkat dari celah penelitian (*research gap*) yang krusial dalam kajian program MPA di Danau Maninjau. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang dominan membahas aspek teknis, ekologis dan ekonomi. Pendekatan etnografi untuk memahami persepsi, makna dan pengalaman masyarakat lokal justru masih sangat terbatas. Kecenderungan menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan, alih-alih subjek yang memiliki agensi, narasi dan strategi. Kekosongan inilah yang akan diisi oleh penelitian ini, dengan menelusuri secara kontekstual praktik pelaksanaan MPA dalam keseharian masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami pandangan masyarakat dalam merespon program pembangunan yang merubah mata pencaharian mereka. Tanpa pemahaman mendalam tentang bagaimana MPA diinterpretasikan, dialami dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan berisiko tinggi mengabaikan realitas di tingkat akar rumput. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan karena dapat mengungkap mengapa suatu kebijakan diterima ditolak atau dimodifikasi oleh masyarakat, serta dinamika kuasa, nilai dan pengetahuan lokal yang membentuk respons tersebut. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi perancangan kebijakan yang tidak hanya efektif secara ekologis, tetapi juga partisipatif, adil, dan berkelanjutan secara sosial.

B. Rumusan Masalah

Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) di Danau Maninjau merupakan respons pemerintah terhadap degradasi ekologis akibat praktik perikanan intensif berbasis Keramba Jaring Apung (KJA). Namun, implementasi program ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan kebijakan, melainkan juga pada bagaimana masyarakat lokal meresponsnya dalam konteks sosial budaya mereka. Dari perspektif ekologi budaya, resistensi masyarakat terhadap MPA tidak dapat dipisahkan dari relasi historis dan kultural mereka dengan Danau Maninjau. Masyarakat setempat telah mengembangkan sistem pengetahuan ekologis yang kompleks selama generasi, dimana praktik perikanan KJA tidak hanya dipandang

sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari adaptasi budaya terhadap perubahan lingkungan.

Tantangan utama dalam pelaksanaan MPA adalah ketidakseimbangan antara tujuan ekologis dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Tekanan ekonomi modern telah menggeser kearifan lokal menjadi eksplorasi berlebihan, menciptakan dikotomi antara keberlanjutan ekologis dan kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun program ini menawarkan alternatif seperti budidaya ikan sistem bioflok, pariwisata dan perkebunan, banyak masyarakat kesulitan beralih karena keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar (Osronita et al., 2021). Selain itu, pendapatan dari sektor alternatif juga seringkali belum mampu menyaingi keuntungan KJA. Tanpa insentif ekonomi yang memadai dan pendampingan berkelanjutan, program MPA berisiko gagal menciptakan transformasi mata pencaharian yang berkelanjutan.

Keberhasilan program MPA tidak hanya dapat dinilai dari aspek teknis dan administratif, tetapi sangat bergantung pada bagaimana masyarakat lokal memaknai, merespon dan menjalankan program tersebut dalam konteks sosial budaya mereka. Pengabaian terhadap pengetahuan lokal, struktur sosial dan nilai-nilai komunitas dapat menyebabkan resistensi, kesenjangan makna, bahkan kegagalan implementasi program. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) di Danau Maninjau oleh masyarakat Nagari Tanjung Sani?

2. Bagaimana pandangan masyarakat Nagari Tanjung Sani terhadap pelaksanaan Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) di Danau Maninjau?

Dengan merumuskan persoalan melalui pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap bagaimana intervensi pembangunan lingkungan seperti MPA dijalankan, dinegosiasikan dan dimaknai dalam lanskap sosial budaya masyarakat lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai peran masyarakat sebagai aktor aktif dalam proses perubahan, serta bagaimana pengetahuan lokal dapat menjadi bagian integral dalam pelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Danau Maninjau secara berkelanjutan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) di Danau Maninjau oleh masyarakat Nagari Tanjung Sani
2. Mendeskripsikan pandangan masyarakat Nagari Tanjung Sani terhadap pelaksanaan Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) di Danau Maninjau

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam tataran teoritis maupun praktis, khususnya dalam memahami dinamika pelaksanaan Program (MPA) di Danau Maninjau melalui pendekatan etnografi..

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian antropologi melihat masyarakat lokal di sekitar Danau Maninjau dalam memaknai, merespons dan menyesuaikan diri terhadap intervensi pembangunan seperti Program MPA. Studi ini akan menjadi kontribusi penting bagi pemahaman ilmiah mengenai hubungan antara manusia dan lingkungan dengan menekankan pada sistem pengetahuan lokal, nilai-nilai budaya serta struktur sosial yang membentuk pola adaptasi terhadap perubahan ekologi dan sosial. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan atau rujukan bagi studi-studi sejenis yang meneliti relasi sosial ekologi dalam konteks wilayah perairan dan program pembangunan berorientasi keberlanjutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan empiris bagi pemerintah, lembaga pelaksana program dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih partisipatif dan kontekstual. Penelitian ini akan mengungkap sejauh mana program MPA dipahami dan dijalankan oleh masyarakat serta hambatan dan

potensi yang dihadapi dalam integrasinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penguatan desain program pemberdayaan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat lokal.

Bagi masyarakat lokal, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keberlanjutan Danau Maninjau dengan tidak hanya mengandalkan pendekatan teknis, tetapi juga mempertimbangkan pengetahuan tradisional dan nilai-nilai lokal. Dengan memahami pola adaptasi dan strategi bertahan masyarakat terhadap kebijakan pengurangan KJA dan pelaksanaan MPA, penelitian ini dapat membantu membangun pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai pembangunan di Danau Maninjau dari perspektif sosial budaya dan ekologis telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Beragam kajian tersebut menunjukkan bahwa Danau Maninjau merupakan ekosistem yang sangat penting secara ekologi sekaligus menjadi ruang hidup masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai budaya, spiritualitas dan sistem penghidupan tradisional. Namun, kompleksitas persoalan sosial ekologi yang terjadi akibat eksplorasi sumber daya dan intervensi kebijakan modern menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam terhadap pengetahuan lokal dalam merespons perubahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memperkuat kontribusi ilmiah dalam kajian etnoekologi, khususnya dalam memahami pandangan masyarakat di kawasan Danau Maninjau terhadap

pelaksanaan Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) sebagai bentuk adaptasi terhadap krisis ekologis dan ekonomi yang mereka hadapi. Berikut tulisan yang menjadi acuan dan referensi perbandingan dalam penelitian ini :

Pertama, artikel yang ditulis oleh Nur Hadiati Endah dan M. Nadjib (2017) berjudul *Pemanfaatan dan Peran Komunitas Lokal dalam Pelestarian Danau Maninjau*. Artikel ini mengkaji pemanfaatan Danau Maninjau secara multifungsi dan peran komunitas lokal dalam pelestarian danau. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap menurunnya nilai ekonomis danau akibat eksplorasi tanpa kendali, khususnya dalam bentuk budidaya Keramba Jaring Apung (KJA). Penulis menekankan bahwa meskipun KJA memberi kontribusi besar bagi ekonomi lokal dan pemerintah daerah, praktik ini juga memicu konflik sosial dan degradasi lingkungan. Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar Danau Maninjau memiliki sikap positif terhadap lingkungan (*environmental attitude*), namun sikap tersebut belum teraktualisasi menjadi perilaku nyata (*actual behavior*) dalam menjaga kelestarian danau. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor penghambat seperti lemahnya regulasi, kurangnya pengawasan, dan pengaruh budaya lokal. Dalam menganalisis persoalan tersebut, penulis mengajukan model collaborative management sebagai solusi atas pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources*) yang selama ini didominasi pendekatan *top-down*. Artikel ini memaparkan bahwa masyarakat Danau Maninjau tidak mengenal hak ulayat atas danau sebagaimana berlaku pada tanah adat. Oleh karena itu, akses terhadap sumber daya perairan bersifat terbuka dan cenderung tidak terkontrol.

Konsep *collaborative management* yang diusulkan Endah dan Nadjib memiliki kesamaan dengan semangat yang melandasi Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Keduanya berangkat dari kesadaran akan krisis ekologis akibat padatnya KJA di Danau Maninjau dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam menjaga ekosistem. Namun, jika artikel Endah dan Nadjib lebih fokus pada kelembagaan pengelolaan dan konflik sumber daya bersama, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat memaknai, merespons, dan berpartisipasi dalam program MPA, khususnya di Nagari Tanjung Sani.

Perbedaan penting lainnya terletak pada pendekatan analitis dan fokus lokus. Penelitian Endah dan Nadjib lebih banyak menggunakan pendekatan institusional dan kebijakan publik dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk menelusuri bagaimana program MPA dijalani, dinegosiasikan, dan dimaknai dalam konteks sosial-budaya masyarakat lokal. Di sisi lain, Endah dan Nadjib belum mengeksplorasi secara mendalam narasi lokal, dinamika resistensi, atau makna simbolik danau dalam kehidupan masyarakat, dimensi yang justru menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Osronita dkk (2021) berjudul *Alternatif Pengalihan Usaha Petani Keramba Jaring Apung (KJA) Menjadi Usaha Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Ramah Lingkungan di Kawasan Danau Maninjau Kabupaten Agam*. Artikel ini membahas strategi pengalihan usaha dari sektor

budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA) yang telah melebihi daya dukung Danau Maninjau ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ramah lingkungan. Artikel ini dilatarbelakangi oleh urgensi pemulihan ekosistem danau yang mengalami degradasi serius akibat pencemaran limbah pakan ikan dan sedimentasi, yang puncaknya menyebabkan peristiwa kematian ikan secara massal pada 2017. Hasil penelitian menginventarisasi berbagai bentuk usaha alternatif, seperti pariwisata air (floating tourism), wisata sejarah, wisata edukasi, religi, sport tourism, kuliner dan geowisata. Pengalihan usaha ini dirancang agar sesuai dengan karakteristik lokal dan daya dukung lingkungan. Konsep utama yang digunakan dalam artikel ini adalah alih usaha berbasis keberlanjutan lingkungan serta pendekatan ekonomi kreatif lokal. Pendekatan ini menggunakan gagasan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan berbasis masyarakat. Selain itu, artikel ini juga mengadopsi pendekatan kawasan dalam melihat potensi spasial dan budaya sebagai dasar transformasi ekonomi. Konsep geowisata yang digunakan menempatkan sumber daya geologi, budaya, dan lingkungan sebagai daya tarik utama, yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pendidikan dan konservasi.

Persamaan antara penelitian Osronita dkk. dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus keduanya terhadap transisi ekonomi dari sektor yang tidak ramah lingkungan ke sektor alternatif yang lebih berkelanjutan. Keduanya sama-sama memperlihatkan bahwa pergeseran aktivitas ekonomi tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan teknis semata, melainkan harus mempertimbangkan potensi lokal, daya dukung lingkungan serta peran aktif masyarakat. Kedua penelitian juga berpijak pada realitas bahwa eksplorasi danau

melalui KJA telah melampaui batas ekologis dan membutuhkan respon struktural dan sosial. Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam sudut pandang dan pendekatannya. Penelitian Osronita dkk. lebih bersifat perencanaan teknokratik dengan fokus pada penataan spasial, sektor unggulan, dan penyesuaian infrastruktur. Masyarakat digambarkan sebagai objek yang perlu diarahkan dan diberdayakan melalui alih usaha. Sebaliknya, penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap program MPA menggunakan pendekatan etnografi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek yang aktif dalam menafsirkan, merespons, dan bahkan menegosiasikan program yang dijalankan oleh pemerintah. Penelitian tersebut lebih menyoroti aspek pengalaman, resistensi, dan dinamika sosial dalam pelaksanaan program.

Ketiga, karya Robert Chambers yang berjudul *Rural Development: Putting the Last First* (1983). Buku ini berisi kritik tajam terhadap paradigma pembangunan pedesaan konvensional yang didominasi oleh perspektif orang luar (perencana, birokrat, akademisi). Chambers berargumen bahwa pendekatan *top-down* tersebut telah mengabaikan pengetahuan, prioritas dan realitas kompleks masyarakat pedesaan yang paling miskin dan termarjinalkan. Buku ini menawarkan pembalikan hierarki dengan menempatkan orang terakhir sebagai yang pertama dalam proses pembangunan, menekankan pentingnya mendengarkan, belajar dan memberdayakan pengetahuan lokal. Pendekatan yang digunakannya bersifat partisipatif dan reflektif yang mendorong metode seperti *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk menggali pemahaman dari dalam komunitas, serta

mengkritik berbagai bias seperti bias perkotaan, bias proyek, dan bias musim yang mendistorsi perencanaan.

Persamaan utama antara karya Chambers dengan penelitian ini terletak pada semangat dan objek kritiknya. Keduanya sama-sama mempertanyakan efektivitas dan kesesuaian program pembangunan yang dalam hal ini fokus pada mata pencaharian alternatif. Penelitian yang fokus pada pandangan masyarakat sejalan dengan seruan Chambers untuk mendahuluikan perspektif orang dalam sebagai sumber analisis yang sah. Keduanya juga berpotensi mengungkap kesenjangan antara desain program dengan realitas sosial-ekologi lokal. Namun terdapat perbedaan konteks, dimana buku Chambers bersifat general untuk pembangunan pedesaan secara luas. Sementara penelitian di Danau Maninjau bersifat spesifik dalam sebuah ekosistem danau dengan konflik antara kebijakan, ekonomi (keramba jaring apung) dan kelestarian lingkungan. Tinjauan ini menempatkan penelitian tentang program mata pencaharian alternatif di Danau Maninjau sebagai sebuah studi kasus yang dapat mengonfirmasi, memperdalam atau merelevansi kritik Chambers dalam konteks kekhasan masalah sumber daya alam berbasis perairan.

Kempat, artikel yang disusun oleh Luce Dwi Nanda, Firwan Tan dan Melinda Noer (2018) berjudul *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyelamatan dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Danau Maninjau*. Penelitian ini menyoroti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan program penyelamatan dan pengelolaan lingkungan Danau Maninjau. Dalam konteks kerusakan dan pencemaran danau akibat Keramba Jaring

Apung (KJA), pemerintah telah meluncurkan berbagai program penyelamatan lingkungan. Namun, studi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan dan monitoring masih tergolong sangat minim. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang seharusnya berbasis masyarakat justru dijalankan secara *top-down*. Penelitian ini menggunakan Tipologi Arnstein sebagai kerangka analisis untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat yang menggambarkan delapan tangga partisipasi dari yang paling rendah (manipulasi) hingga tertinggi (*citizen control*). Dalam studi ini, partisipasi masyarakat di tahap perencanaan berada pada level informing, pelaksanaan pada level consultation, dan evaluasi hanya sampai tahap therapy, yang semuanya masih tergolong partisipasi semu (*tokenism*). Ini menunjukkan bahwa masyarakat hanya dijadikan objek informasi, bukan subjek pengambilan keputusan, sehingga mengurangi rasa kepemilikan terhadap program tersebut.

Hasil penelitian ini mengungkap beberapa penyebab rendahnya partisipasi masyarakat, antara lain keterbatasan lahan usaha, ketergantungan ekonomi pada KJA, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan lemahnya penegakan regulasi juga turut memperburuk situasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program lingkungan tidak hanya ditentukan oleh desain teknis, melainkan juga oleh proses sosial yang melibatkan masyarakat secara aktif dan bermakna.

Jika dibandingkan dengan penelitian mengenai pandangan masyarakat terhadap Program MPA, terdapat sejumlah persamaan yang mencolok. Kedua studi menyoroti adanya keterputusan antara desain program dari atas (pemerintah) dan realitas di tingkat akar rumput. Dalam kedua kasus, masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk terlibat secara aktif dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program. Akibatnya, muncul resistensi pasif, rendahnya komitmen, dan kurangnya keberlanjutan dalam implementasi program. Namun, terdapat juga perbedaan penting dalam pendekatan dan fokus kajiannya. Artikel Luce dkk. lebih menekankan pada evaluasi formal tingkat partisipasi masyarakat dalam program berbasis lingkungan menggunakan kerangka partisipatif (Arnstein), sementara penelitian tentang pandangan masyarakat terhadap MPA menggunakan pendekatan etnografi, yang berfokus pada bagaimana masyarakat secara kultural dan sosial menanggapi, menafsirkan, atau bahkan menegosiasikan program yang masuk. Dengan kata lain, artikel ini menganalisis partisipasi secara struktural, sedangkan penelitian MPA menangkap nuansa partisipasi secara kontekstual dan relasional. Artikel Luce dkk. (2018) memberi kontribusi signifikan dalam memahami kegagalan implementasi program penyelamatan lingkungan akibat partisipasi semu. Dalam konteks Danau Maninjau, tinjauan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan program-program berbasis lingkungan, termasuk MPA, sangat bergantung pada pelibatan aktif masyarakat lokal.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Tri Wiji Nurani dkk (2024) tentang *Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif bagi Nelayan Kabupaten Kebumen* dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Artikel ini membahas upaya

pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA) di wilayah pesisir Sungai Luk Ulo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Fokus utamanya adalah mencari solusi atas kerentanan ekonomi masyarakat nelayan akibat tekanan oseanografi dan ketidakpastian musim tangkap. Alternatif yang diusulkan mencakup budidaya kepiting bakau, kegiatan perikanan tangkap yang lebih terukur, dan pengembangan wisata sungai berbasis komunitas. Ketiga bentuk kegiatan ini diposisikan sebagai strategi adaptif untuk memperluas basis ekonomi lokal yang berkelanjutan. Salah satu poin penting dari artikel ini adalah penekanan terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata dan sektor ekonomi baru. Penulis menekankan bahwa keberlanjutan program sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dalam konteks ini, konsep *Community-Based Resource Management* (CBRM) atau pengelolaan sumber daya berbasis komunitas menjadi kerangka kerja utama. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumber daya lokal, bukan hanya sebagai penerima manfaat program. Dengan memanfaatkan potensi muara sungai sebagai kawasan ekowisata dan budidaya, strategi MPA di Kebumen menunjukkan contoh konkret dari diversifikasi ekonomi lokal berbasis daya dukung lingkungan dan kearifan lokal.

Jika dibandingkan dengan penelitian program MPA di danau Maninjau, terdapat kesamaan tujuan dan semangat dasar, yaitu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan atau rentan terhadap risiko ekologis. Di Danau Maninjau, masyarakat dihadapkan pada ancaman ekologis akibat penggunaan KJA yang tidak terkendali, yang mendorong

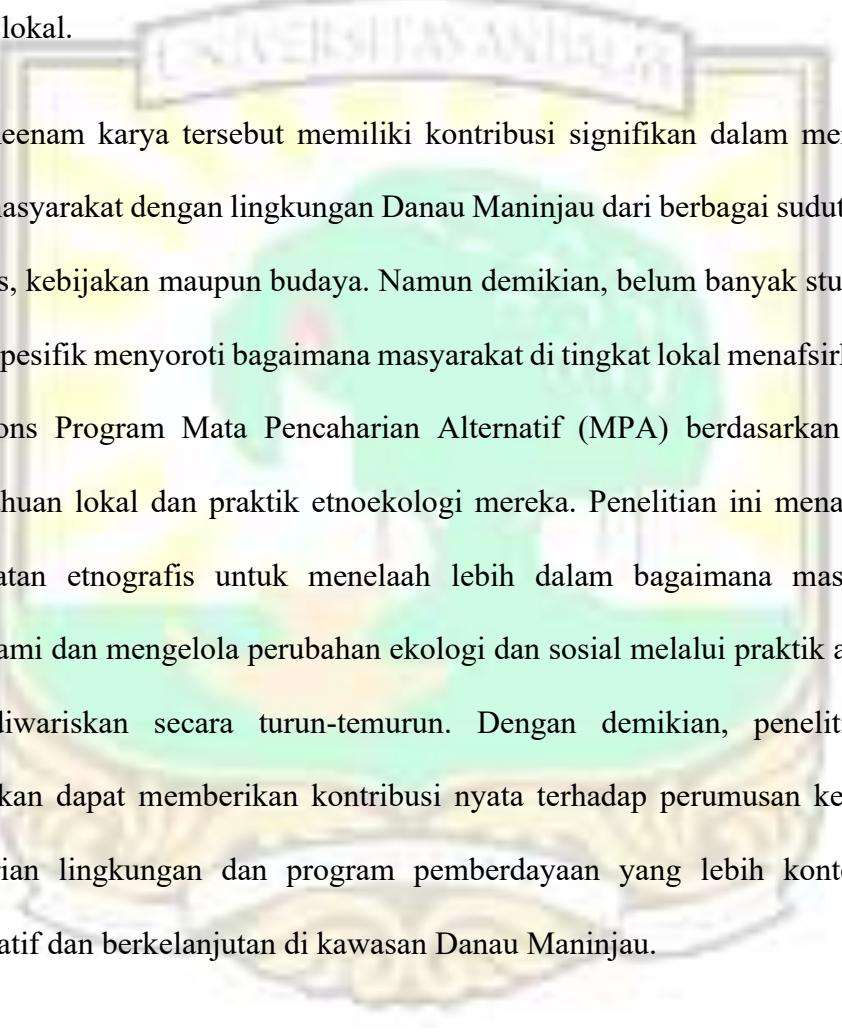
perlunya program MPA sebagai solusi transformatif. Sementara itu, di Kebumen, tekanan berasal dari kondisi oseanografi dan musim penangkapan yang fluktuatif. Kedua konteks tersebut menunjukkan bahwa program MPA muncul sebagai respons adaptif terhadap krisis ekologis dan sosial-ekonomi. Namun demikian, terdapat perbedaan mencolok dalam hal respon masyarakat dan proses partisipasi. Berdasarkan temuan di Danau Maninjau, resistensi masyarakat terhadap program MPA kerap muncul akibat pendekatan yang *top-down*, minimnya akses terhadap modal, serta kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas program. Sementara itu, dalam studi di Kebumen, keterlibatan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengelolaan wisata dan budi daya menjadi faktor pendorong keberlanjutan program. Dengan demikian, aspek institusional dan relasi kuasa antara masyarakat dan pemerintah menjadi variabel penting yang membedakan dua studi ini. Lebih lanjut, artikel Tri Wiji Nurani dkk. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan program MPA tidak hanya bergantung pada desain ekonomi alternatif semata, melainkan pada sejauh mana program tersebut mampu mendorong agensi masyarakat dalam mengambil alih peran sebagai pelaku utama perubahan.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Benny Osta Nababan dan Yesi Dewita Sari (2014) tentang *Identifikasi dan Strategi Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Taman Wisata Perairan Laut Banda*. Penelitian ini mengkaji upaya pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA) di wilayah konservasi pesisir Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda. Tujuan utama dari pengembangan ini adalah menciptakan keseimbangan antara upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dalam

konteks ini, masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian pala dan penangkapan ikan tradisional didorong untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Studi ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis sumber daya lokal sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang sesuai dan berkelanjutan. Salah satu bentuk MPA yang diusulkan dalam studi ini adalah budidaya rumput laut, yang dianggap paling kompatibel dengan karakteristik ekosistem pesisir Laut Banda serta kapasitas teknis masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong keberhasilan implementasi program ini. Dari sisi konseptual, pendekatan yang digunakan dalam studi ini berakar pada prinsip ekonomi ekologis, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kearifan lokal sebagai fondasi pengembangan ekonomi.

Jika dibandingkan dengan penelitian mengenai program MPA di Danau Maninjau, terdapat kesamaan mendasar dalam hal tujuan, yaitu bagaimana menciptakan transformasi ekonomi masyarakat lokal yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Di kedua lokasi, upaya diversifikasi ekonomi dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang mengalami degradasi, baik di wilayah pesisir Laut Banda maupun danau air tawar Maninjau. Namun, konteks sosial ekologis yang berbeda memberikan dampak pada perbedaan dalam pola pelaksanaan dan respons masyarakat terhadap program MPA. Perbedaan signifikan tampak pada aspek resistensi kultural dan keterlibatan masyarakat. Di Laut Banda, partisipasi masyarakat dalam proses identifikasi dan perencanaan program MPA cenderung lebih aktif dan terbuka, sebagian besar

disebabkan oleh adanya kejelasan manfaat ekonomi serta pendekatan yang inklusif sejak awal. Di sisi lain, di Danau Maninjau, meskipun program MPA telah digulirkan, terdapat resistensi dari sebagian masyarakat, terutama karena minimnya pelibatan dalam tahap perencanaan. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun *ownership* program melalui dialog sosial dan penyelarasan nilai budaya lokal.



Keenam karya tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam membahas relasi masyarakat dengan lingkungan Danau Maninjau dari berbagai sudut seperti ekologis, kebijakan maupun budaya. Namun demikian, belum banyak studi yang secara spesifik menyoroti bagaimana masyarakat di tingkat lokal menafsirkan dan merespons Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) berdasarkan sistem pengetahuan lokal dan praktik etnoekologi mereka. Penelitian ini menawarkan pendekatan etnografis untuk menelaah lebih dalam bagaimana masyarakat memahami dan mengelola perubahan ekologi dan sosial melalui praktik adaptasi yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perumusan kebijakan pelestarian lingkungan dan program pemberdayaan yang lebih kontekstual, partisipatif dan berkelanjutan di kawasan Danau Maninjau.

F. Kerangka Berpikir

Mata pencaharian dipahami sebagai serangkaian strategi yang digunakan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi bagian integral dari kosmologi, identitas dan jaringan sosial. Namun dalam konteks

intervensi pembangunan modern, transformasi mata pencaharian seringkali didorong oleh kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat namun pelaksanaannya terkadang mengabaikan kompleksitas budaya lokal. Pemikiran Robert Chambers dalam *Rural Development: Putting the Last First* (1983) merupakan sebuah kritik yang tidak hanya teknis, melainkan epistemologis terhadap arus utama pembangunan pedesaan. Chambers mengungkap bahwa kegagalan program pembangunan yang berulang bersumber dari apa yang disebutnya sebagai bias profesional (*professional bias*) dan realitas terbalik (*reversed reality*).

Dalam sistem yang terstruktur secara *top-down*, para perencana pembangunan seperti birokrat dan ahli teknis dari kota cenderung memandang realitas pedesaan melalui kaca mata mereka sendiri yang disaring oleh disiplin ilmu, data kuantitatif dan kunjungan singkat yang hanya dilakukan di lokasi yang mudah diakses dan pada musim tertentu. Akibatnya, mereka gagal menangkap kompleksitas, keragaman dan kerentanan yang dialami oleh masyarakat miskin pedesaan sebagai kelompok yang justru seharusnya menjadi prioritas utama atau *the last* yang harus diletakkan di urutan pertama. Program-program yang dihasilkan dari perspektif yang bias ini seringkali bersifat seragam, kaku dan terstandarisasi sehingga gagal menyentuh akar permasalahan dan realitas sosiologis yang hidup di tingkat lokal. Lebih dari sekadar ketidaktepatan sasaran, Chambers melihat ini sebagai bentuk ketidakmampuan sistemik dari aparatus pembangunan untuk benar-benar mendengarkan dan belajar dari mereka yang menjadi objek programnya.

Sebagai jalan keluar, Chambers tidak sekadar mengusulkan perbaikan teknis, tetapi sebuah revolusi paradigma melalui prinsip Farmer First (Petani Diutamakan). Konsep ini, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam buku *Farmer First: Farmer Innovation and Agricultural Research* (1989) yang dieditori bersama Ian Scoones, secara tegas menolak model linier *Transfer of Technology* (ToT) yang menempatkan petani/nelayan sebagai penerima pasif inovasi dari para ahli. Sebaliknya, buku *Farmer First* berargumen bahwa masyarakat lokal adalah ahli lokal (*local experts*) yang memiliki pengetahuan praktis, rinci dan terkontekstualisasi tentang ekologi, tanah, iklim dan sumber daya mereka sebagai sebuah khazanah pengetahuan yang disebut sebagai pengetahuan indigenous atau *local knowledge*.

Pengetahuan indigenous bukanlah sesuatu yang primitif, melainkan hasil dari proses trial and error, observasi dan adaptasi yang berlangsung lintas generasi. Dalam paradigma baru ini, peran ahli berubah secara fundamental dari seorang penyebar kebenaran menjadi fasilitator yang tugasnya adalah mendengarkan, mempelajari logika lokal dan membantu masyarakat dalam mengeksplorasi, menguji serta mengembangkan solusi mereka sendiri. Dengan demikian Farmer First pada hakikatnya adalah upaya demokratisasi pengetahuan dalam pembangunan, di mana pengetahuan teknis ilmiah tidak lagi mendominasi, tetapi berdialog setara dengan pengetahuan praktis lokal. Konsep ini dioperasionalkan melalui pendekatan *Participatory Development* dan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Partisipasi di sini bukanlah sekadar kehadiran fisik atau

pengerahan tenaga, melainkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dalam pengambilan keputusan substantif.

Melalui serangkaian alat PRA seperti pemetaan partisipatif, diagram Venn hubungan kelembagaan dan analisis mata pencaharian, masyarakat yang tanpa terkecuali termasuk kelompok marginal yang biasanya tak bersuara diberi ruang dan alat untuk menganalisis, merepresentasikan dan mendiskusikan kondisi mereka sendiri. Proses ini pada dasarnya adalah sebuah transformasi relasi kuasa yang radikal. Ia mengubah hubungan hierarkis antara pemberi (donor/pemerintah) dan penerima bantuan, menjadi kemitraan setara yang saling belajar. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam seluruh siklus pembangunan mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, implementasi hingga monitoring dan evaluasi sehingga tumbuh rasa memiliki (*sense of ownership*) yang kuat. Rasa memiliki inilah yang menjadi kunci pokok keberlanjutan suatu program, karena sebuah inisiatif yang dimiliki oleh komunitas akan terus dipelihara dan dikembangkan bahkan setelah intervensi eksternal berakhir.

Sebuah program pembangunan partisipatif idealnya tidak hanya memanfaatkan *bonding social capital* (jaringan dan kepercayaan dalam komunitas) seperti tradisi gotong royong, tetapi juga harus memperkuatnya dan sekaligus membangun bridging social capital, yaitu jaringan yang menghubungkan komunitas dengan aktor-aktor di luar dirinya (seperti pemerintah daerah, universitas, atau pasar) untuk memperluas akses terhadap sumber daya, informasi, dan peluang baru. Pemikiran Chambers menawarkan sebuah lensa analitis yang

komprehensif untuk menilai hakikat sebuah program pembangunan: ia menggeser fokus dari sekadar kehadiran fisik proyek dan output yang terukur, kepada proses transformasi sosial politik dan kognitif yang memberdayakan komunitas untuk menjadi aktor utama perubahan di wilayah mereka sendiri.

Penilaian masyarakat terhadap suatu program pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan teknis atau ekonomi, melainkan berakar kuat pada kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang hidup. Bertolak dari pemikiran Ward H. Goodenough dalam *Description and Comparison in Cultural Anthropology* (1970) tentang fondasi kognitif budaya sebagai sistem pengetahuan. Kebudayaan dipahami bukan sebagai artefak atau perilaku lahiriah melainkan sebagai apa yang ada di dalam pikiran anggota masyarakat, yakni seperangkat standar pengetahuan tentang apa yang perlu diketahui untuk mempercayai, menilai dan bertindak secara kompeten dalam kehidupan sosial. Hal ini bukan sekadar pengetahuan tentang fakta, melainkan suatu teori implisit kompleks tentang dunia yang berfungsi sebagai peta kognitif (*cognitive map*) untuk menavigasi realitas sosial. Lebih lanjut Goodenough menekankan bahwa sistem pengetahuan budaya ini bersifat publik, dipelajari dan terbagi (*shared*) meskipun distribusi dan penguasaannya bisa bervariasi antar individu. Proses belajar ini bukanlah transfer informasi pasif melainkan suatu konstruksi aktif melalui pengalaman dan interaksi sosial yang terus-menerus. Konsekuensinya, pengetahuan budaya bersifat dinamis dan kontekstual mampu beradaptasi namun dalam kerangka logika internalnya sendiri. Dalam konteks penilaian program pembangunan, hal ini menjelaskan mengapa masyarakat dapat

memberikan respons yang berbeda-beda bahkan terhadap program yang secara teknis identik karena pengalaman historis, relasi kekuasaan dan kondisi ekologis lokal telah membentuk varian-varian khusus dari peta kognitif kolektif mereka. Sistem pengetahuan ini berfungsi sebagai alat survival kognitif yang memungkinkan masyarakat memprediksi perilaku orang lain, mengantisipasi konsekuensi sosial dan mempertahankan rasa keteraturan dalam dunia yang penuh ketidakpastian.

KONSEPSI ini kemudian diperdalam secara operasional oleh James P. Spradley melalui *The Ethnographic Interview* (1979) dan *The Cultural Experience: Ethnography in Complex Society* (1972) yang menegaskan bahwa kebudayaan merupakan sistem ide atau gagasan pengetahuan manusia yang digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman serta menjadi pedoman dalam bersikap dan mewujudkan tingkah laku. Pengetahuan budaya bekerja pada dua tingkat kesadaran yang saling terkait, yaitu kebudayaan eksplisit dan kebudayaan tacit (terselubung). Kebudayaan eksplisit mencakup pengetahuan yang disadari, dapat dikomunikasikan secara verbal melalui bahasa, aturan adat, norma dan penjelasan normatif sehingga masyarakat mampu menyatakan secara sadar alasan-alasan di balik penilaian mereka terhadap suatu program pembangunan. Namun di balik pengetahuan yang tampak tersebut, terdapat kebudayaan tacit yang bekerja lebih dalam dan sering kali tidak disadari, berupa asumsi-asumsi dasar, skema interpretasi dan logika praktis yang dianggap *taken-for-granted* seperti cara pandang tentang relasi manusia dengan alam, konsep waktu atau otoritas sosial. Pengetahuan tacit inilah yang kerap menentukan mengapa suatu program yang

secara teknis dianggap baik justru dirasakan asing, mengancam atau tidak layak diterapkan.

Pengetahuan eksplisit dan tacit tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi ke dalam pola atau konfigurasi kebudayaan yang koheren sebagaimana dijelaskan oleh Ruth Benedict dalam *Patterns of Culture* (1934), di mana nilai, norma dan praktik dalam suatu budaya cenderung membentuk keseluruhan yang terintegrasi dan pola psikologis masal yang memberinya karakteristik khusus pada masyarakat. Dalam konteks pembangunan, program tidak dinilai secara terpisah per komponennya melainkan dihadapkan pada keseluruhan pola budaya sehingga program yang membawa nilai tertentu misalnya individualisme atau kompetisi akan ditimbang kesesuaiannya dengan pola budaya yang mungkin lebih menekankan harmoni, gotong royong dan keseimbangan sosial.

Dari sinilah pengetahuan budaya kemudian diaktifkan menjadi argumentasi budaya, sebagaimana dijelaskan oleh Benjamin S. Orlove dalam esainya tentang antropologi ekologi (1980) dan karya-karyanya mengenai petani Andes di mana masyarakat tidak sekadar memiliki pengetahuan budaya, tetapi secara aktif menggunakan untuk membaca lingkungan, menimbang konsekuensi sosial, ekologis dan ekonomi dari suatu intervensi serta membangun justifikasi yang sahih secara sosial untuk menerima, memodifikasi atau menolak program pembangunan. Argumentasi budaya ini menjadi bahasa nalar kolektif yang digunakan masyarakat untuk menjelaskan pilihan-pilihan mereka, baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak luar, dan berfungsi sebagai pedoman nilai dalam menafsirkan perubahan.

Pada titik ini, argumentasi budaya berinteraksi dengan rasionalitas instrumental sebagaimana dikemukakan oleh Samuel L. Popkin dalam *The Rational Peasant* (1979) yang melihat petani dan masyarakat pedesaan sebagai aktor rasional yang mempertimbangkan risiko, keuntungan dan keberlanjutan hidup dalam kondisi ketidakpastian. Namun rasionalitas tersebut tidak berdiri di ruang hampa, melainkan dibingkai dan didefinisikan oleh argumentasi budaya, sebab apa yang dianggap sebagai manfaat, biaya atau risiko justru ditentukan oleh sistem pengetahuan, nilai dan pengalaman sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi subsistensi, misalnya keputusan untuk menolak inovasi atau program tertentu bukanlah bentuk irasionalitas melainkan pilihan rasional yang mendahului keselamatan, stabilitas sosial dan keberlanjutan penghidupan dibandingkan keuntungan jangka pendek yang penuh ketidakpastian.

Respon masyarakat terhadap program pembangunan baik berupa penerimaan, modifikasi maupun penolakan merupakan puncak dari proses kognitif-sosial yang kompleks. Sistem pengetahuan budaya membentuk pola makna yang diaktifkan menjadi argumentasi budaya dan argumentasi ini kemudian membingkai tindakan rasional yang terkonstektualisasi. Memahami pandangan masyarakat secara utuh mensyaratkan pendekatan etnografis yang tidak hanya mendengarkan pernyataan eksplisit tetapi juga membaca logika tacit dan argumentasi budaya yang mendasari pilihan-pilihan sosial mereka sehingga rasionalitas dan kebudayaan tidak dipahami sebagai dua kutub yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama dalam praktik sosial yang hidup. Pandangan tersebut juga selalu dinegosiasikan dalam arena pengalaman historis dan kondisi material yang

membentuk batas-batas kemungkinan tindakan masyarakat. Dengan demikian, etnografi menjadi kunci untuk menangkap dinamika ini secara mendalam karena memahami bagaimana pengetahuan, nilai dan kepentingan berkelindan dalam praktik sehari-hari masyarakat ketika berhadapan dengan intervensi pembangunan.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) dan jumlah petani KJA terbanyak di Danau Maninjau. Keberadaan KJA yang padat di wilayah ini mencerminkan ketergantungan dan keterikatan masyarakat terhadap danau sebagai sumber mata pencaharian utama.

Tabel 2.

Jumlah Keramba Jaring Apung dan Kepemilikannya di Danau Maninjau

No	Nama Nagari	Jumlah KJA	Jumlah Pemilik KJA
1.	Koto Malintang	5.647 Unit	199 Orang
2.	Koto Gadang	1.726 Unit	119 Orang
3.	Kota Kaciak	791 Unit	41 Orang
4.	Duo Koto	1.065 Unit	43 Orang
5.	Bayua	4.122 Unit	271 Orang
6.	Maninjau	1.561 Unit	130 Orang
7.	Sungai Batang	2.582 Unit	240 Orang
8.	Tanjung Sani	5.865 Unit	635 Orang

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2024

Selain itu, Nagari Tanjung Sani juga merupakan lokasi penerima utama bantuan Program MPA dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu,

wilayah ini sangat relevan untuk diteliti dalam konteks implementasi program dan respons sosial masyarakat

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana masyarakat lokal di Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, memandang dan menyesuaikan diri dengan kebijakan Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kegiatan perikanan intensif berbasis keramba jaring apung (KJA). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada data numerik, melainkan menggali makna, nilai dan narasi lokal yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk adaptasi sosial dan ekologis.

Pendekatan kualitatif memberikan gambaran holistik, menyampaikan suara dan pandangan informan, serta memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dan budaya (Creswell, 2015: 415). Dalam konteks ini, pendekatan tersebut sangat relevan untuk mengkaji bagaimana praktik masyarakat dan kearifan lokal terkait pemanfaatan sumber daya Danau Maninjau bersinggungan dengan program mata pencarian alternatif. Yin (2016: 24) menjelaskan bahwa pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami kompleksitas hubungan antara masyarakat dan lingkungan melalui analisis mendalam terhadap suatu wilayah atau komunitas tertentu.

Sebagai bagian dari pendekatan kualitatif, metode etnografi dipilih untuk menangkap pola pikir, sistem nilai serta praktik keseharian masyarakat dalam berhubungan dengan lingkungan danau secara alami dan kontekstual. Etnografi bertujuan untuk memahami sistem budaya dan makna simbolik yang mengarahkan tindakan sosial masyarakat (Spradley, 1979). Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam serta dokumentasi etnografis terhadap aktivitas masyarakat yang mencerminkan bentuk adaptasi ekologis dan transformasi sosial ekonomi mereka, baik yang bersumber dari tradisi maupun akibat pengaruh program MPA.

Dalam penelitian ini, metode etnografi digunakan untuk mengamati masyarakat lokal dalam menafsirkan perubahan ekologis serta mengadopsi atau menolak program MPA. Kehadiran Program MPA menjadi titik penting dalam penelitian ini karena mewakili intervensi eksternal dalam sistem mata pencaharian masyarakat di sekitar Danau Maninjau. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi untuk menjelaskan dinamika antara program berbasis kebijakan dan realitas sosial budaya masyarakat lokal, termasuk faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberlanjutan program MPA dalam jangka panjang.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat langsung dalam pemanfaatan Danau Maninjau, baik sebagai sumber mata pencaharian utama maupun sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, serta pihak yang terlibat dalam implementasi dan pengawasan Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) di

Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan teknik Purposive Sampling, yaitu dengan sengaja memilih individu-individu kunci berdasarkan ciri-ciri spesifik yang secara langsung berkaitan dengan fokus penelitian (Mantra, 2004:121).

Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan pada tingkat pemahaman, keterlibatan serta pengalaman mereka dalam pemanfaatan Danau Maninjau. Keberagaman perspektif dari informan menjadi elemen penting untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai hubungan masyarakat dengan danau. Sejalan dengan pendekatan etnografi, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu informan kunci dan informan biasa (Koentjaraningrat, 1997:164). Kedua kategori ini bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial dan ekologis secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang.

a. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini merupakan individu-individu yang memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman langsung serta keterlibatan aktif dalam pemanfaatan sumber daya Danau Maninjau dan dinamika pelaksanaan Program Mata Pencaharian Alternatif (MPA). Mereka tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi tetapi juga sebagai subjek sosial yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, adaptasi dan negosiasi terhadap kebijakan pembangunan yang menyentuh ruang hidup mereka.

Kriteria informan kunci meliputi dua kelompok utama, yaitu masyarakat yang telah beralih dari usaha Keramba Jaring Apung (KJA) ke program Mata Pencaharian Alternatif (MPA), serta masyarakat yang memilih untuk tetap bertahan pada usaha KJA. Informan kunci menjadi pintu masuk utama untuk menelusuri lapisan respons masyarakat sehingga memungkinkan peneliti menangkap dinamika rasionalitas, argumentasi budaya serta strategi bertahan hidup yang berkembang di tengah perubahan ekologis dan kebijakan pembangunan.

Tabel 3.
Informan Kunci Penelitian

No	Nama	Usia	Suku	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
1.	RB	45	Guci	LK	Muko Jalan	Pemerintah Nagari Tanjung Sani dan Nelayan <i>Pukek</i>
2.	AR	48	Piliang	LK	Batu Nanggai	Pengurus Kelompok Nelayan Maju Bersama
3.	L	43	Melayu	PR	Sigiran	Pengurus Kelompok Peternak Ayam Sigiran Jaya Farm
4.	F	76	Datuak Pamon cak	LK	Pantas	Pengurus Kelompok Nelayan tangkap Bunga Seroja
5.	MR	47	Jambak	PR	Pandan	Pengurus Kelompok Wanita Tani Badunsanak
6.	HDP	27	Tanjung	LK	Batu Nanggai	Nelayan <i>Pukek</i>
7.	A	48	Melayu	PR	Sigiran	Petani KJA
8.	NS	62	Tanjung	LK	Gelapung	Petani KJA
9.	DM	22	Guci	PR	Pantas	Petani KJA
10.	DAP	22	Melayu	PR	Sigiran	Petani KJA

Sumber: Data Primer, 2025

b. Informan Biasa

Informan biasa adalah tokoh yang berperan dalam koordinasi pelaksanaan program MPA serta warga nagari Tanjung Sani yang tidak memiliki keterlibatan

langsung dengan KJA dan MPA namun tetap memiliki interaksi dengan Danau Maninjau dan merasakan dampak dari perubahan ekosistem dan pelaksanaan program MPA. Kriteria informan biasa yaitu: Dinas Perikanan Kabupaten Agam, masyarakat umum yang bermukim di sekitar danau, pengguna danau untuk kebutuhan harian misalnya untuk mandi, mencuci atau mengambil air.

Pemilihan informan yang beragam ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pandangan masyarakat dalam merespons Program MPA. Melalui informasi yang diperoleh dari kedua kategori informan, penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat menilai keberhasilan, tantangan dan keberlanjutan MPA secara kultural dan struktural, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan konservasi dan pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan serta berkelanjutan.

Tabel 4.
Informan Biasa Penelitian

No	Nama	Usia	Suku	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan
1.	MDY	30	Melayu	PR	Lubuk Basung	Dinas Perikanan Agam
2.	DE	43	Jambak	PR	Lubuk Basung	Dinas Perikanan Agam
3.	RA	22	Tanjung	LK	Sigiran	Mahasiswa
4.	MY	57	Guci	PR	Pantas	Wiraswasta
5.	SNR	23	Piliang	PR	Batu Nanggai	IRT

Sumber: Data Primer, 2025

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat dua metode utama dalam pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan atau informan melalui

berbagai teknik pengumpulan data. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dokumen, laporan penelitian sebelumnya serta sumber tertulis lainnya yang relevan (Usman, 2015:29). Kombinasi dari kedua jenis data ini memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan masyarakat terhadap program mata pencaharian alternatif (MPA) di Danau Maninjau. Dalam penelitian ini, digunakan empat teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna mendapatkan data yang akurat dan mendetail. Menurut Usman (2015:30), observasi adalah proses pengamatan terhadap objek penelitian untuk mengecek informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memahami praktik, kebiasaan, dan interaksi masyarakat dengan ekosistem Danau Maninjau. Pengamatan dilakukan terhadap aspek ekologis seperti penggunaan sumber daya alam, pelaksanaan program MPA dan sistem pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Observasi ini juga memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial yang terjadi dalam keseharian masyarakat serta bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti. Menurut Koentjaraningrat (1997:162),

wawancara adalah tindakan bertanya secara lisan antara pewawancara dan narasumber guna mengumpulkan fakta, informasi, atau pendapat mengenai suatu subjek. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam eksplorasi informasi.

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk tokoh adat, nelayan, petani, dan pemangku kebijakan lokal, guna memperoleh perspektif yang beragam terkait hubungan masyarakat dengan Danau Maninjau. Aspek-aspek yang ditanyakan meliputi praktik ekologi tradisional, perubahan lingkungan yang dirasakan masyarakat, serta upaya adaptasi dan konservasi yang dilakukan. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk menggali nilai-nilai budaya yang melekat dalam praktik pengelolaan sumber daya alam. Hasil wawancara juga akan digunakan untuk memverifikasi data observasi yang diperoleh dari lapangan, sehingga memastikan keakuratan dan validitas penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh berbagai referensi ilmiah yang relevan guna mendukung landasan teoritis dan konseptual penelitian. Menurut Zed (2004:3), studi kepustakaan merupakan langkah penting dalam penelitian akademik karena membantu peneliti memahami teori dan konsep yang telah dikembangkan sebelumnya serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat diisi melalui studi empiris. Studi kepustakaan juga menjadi alat untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian dengan merujuk pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data yang akan dikaji

meliputi buku akademik, jurnal ilmiah, artikel dari media terpercaya, skripsi atau tesis dari penelitian sebelumnya, serta publikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga penelitian terkait.

Fokus utama dalam studi kepustakaan ini adalah literatur yang membahas aspek ekologi, budaya, serta ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam konteks pemanfaatan danau sebagai sumber mata pencaharian dan kebutuhan lainnya. Beberapa referensi yang relevan misalnya teori ekologi budaya dari Steward dan Konsep participatory development Chambers. Teori-teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami bagaimana masyarakat lokal memandang program Mata Pencarian Alternatif.

Selain itu, studi kepustakaan juga akan digunakan untuk memahami dinamika perubahan ekologi di Danau Maninjau dan bagaimana perubahan tersebut berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Beberapa studi sebelumnya yang membahas ekologi perairan dan interaksi manusia-lingkungan dalam konteks danau akan dianalisis untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana perubahan lingkungan mempengaruhi praktik sosial dan budaya masyarakat setempat. Dengan adanya kajian literatur yang mendalam, penelitian ini akan memiliki dasar ilmiah yang kuat, sehingga data yang diperoleh dari penelitian lapangan dapat lebih terstruktur dan memiliki validitas yang tinggi.

d. Dokumentasi

Selama proses penelitian di lapangan, peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai teknik pendukung dalam mengumpulkan data empiris.

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menangkap aspek visual dan auditori yang tidak dapat didokumentasikan melalui teks saja (Sugiyono, 2017). Dokumentasi ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, seperti kamera pada ponsel untuk mengambil gambar dan video, serta alat perekam suara guna merekam wawancara dengan narasumber. Menurut Bogdan dan Biklen (1982), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk menyimpan bukti visual atau audio yang dapat membantu proses analisis data secara lebih akurat. Foto dan video yang diambil selama penelitian akan menggambarkan kondisi lingkungan Danau Maninjau, aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan danau, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya tersebut. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam analisis, tetapi juga dapat digunakan sebagai bukti autentik yang mendukung argumen dan temuan penelitian.

Rekaman suara akan sangat membantu dalam merekam wawancara dengan informan, terutama ketika terdapat detail penting yang mungkin terlewat saat pencatatan manual. Menurut Yin (2016), rekaman wawancara memberikan keuntungan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis kembali percakapan dengan informan tanpa kehilangan detail yang penting. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih mendalam serta memastikan akurasi dalam penyusunan hasil penelitian.

Selain dokumentasi dalam bentuk gambar dan suara, peneliti juga akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait yang dapat mendukung penelitian ini, seperti laporan pemerintah mengenai kondisi ekologi Danau Maninjau, hasil penelitian terdahulu mengenai masyarakat setempat, serta catatan sejarah yang berkaitan dengan perkembangan pemanfaatan sumber daya danau. Menurut Creswell (2015: 240), dokumen-dokumen tersebut dapat menjadi sumber data tambahan yang membantu dalam triangulasi data, sehingga hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya. Dengan adanya teknik dokumentasi yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara masyarakat lokal dengan Danau Maninjau, serta bagaimana dinamika sosial-ekologi yang terjadi dalam konteks etnoekologi masyarakat Nagari Tanjung Sani.

5. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga komponen analisis yang saling berkaitan. Pertama, reduksi data (*data reduction*) dilakukan melalui proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan dan abstraksi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memisahkan data yang tidak esensial dan memfokuskan analisis pada informasi yang benar-benar relevan dengan partisipasi masyarakat dalam Program Mata Pencaharian Alternatif. Data dari wawancara dan observasi ditransformasikan menjadi catatan naratif yang terstruktur melalui proses koding tematik, sehingga memunculkan

pola-pola signifikan yang siap untuk disajikan lebih lanjut (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), dimana data yang telah direduksi diorganisasikan ke dalam matriks, bagan alir dan tabel hubungan antarkategori. Penyajian data secara sistematis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan logis, melihat kesenjangan informasi dan merumuskan implikasi dari temuan yang ada. Visualisasi data tidak hanya berfungsi untuk menyederhanakan kompleksitas informasi, tetapi juga memfasilitasi proses penarikan kesimpulan yang lebih komprehensif.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), dimana peneliti melakukan interpretasi terhadap pola-pola yang muncul untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan awal yang dirumuskan kemudian diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode, diskusi dengan informan kunci (member check) serta penelusuran konsistensi bukti-bukti yang ada, sehingga dihasilkan suatu temuan yang kredibel dan bermakna mengenai persepsi dan dinamika partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berkelanjutan di kawasan Danau Maninjau.

6. Proses Jalannya Penelitian

Perjalanan penelitian ini berawal dari keterlibatan peneliti dalam program MBKM Membangun Desa di kawasan Danau Maninjau pada periode April hingga Juli 2024, yang memantik ketertarikan mendalam untuk mengkaji kawasan tersebut. Namun, proses penyusunan proposal sempat terhenti sementara karena

peneliti harus menjalani program MSIB di Pulau Jawa dari Agustus hingga Desember 2024. Baru pada Februari 2025, peneliti mulai mengajukan judul penelitian kepada dosen pembimbing, yang awalnya berjudul “Etnoekologi Danau Maninjau Dalam Perspektif Masyarakat Lokal Nagari Tanjung Sani”. Proses administrasi formal dimulai dengan penyelesaian pendaftaran SK Pembimbing Skripsi pada Mei 2025, yang kemudian resmi dikeluarkan pada 18 Juni 2025.

Untuk memperkuat dasar penelitian, peneliti telah lebih dulu melakukan observasi awal pra-penelitian dari 10 Juni hingga 22 Juli 2025. Selanjutnya, peneliti menjalani serangkaian bimbingan dan revisi intensif yang mencakup penyesuaian judul, sistematika penulisan, rumusan masalah, isi dan fokus penelitian berdasarkan arahan dosen pembimbing. Setelah melalui beberapa kali perbaikan, akhirnya peneliti mendapatkan persetujuan untuk mengikuti Ujian Seminar Proposal pada Kamis, 2 Oktober 2025. Dalam sidang tersebut, peneliti menerima banyak masukan berharga dari para pengudi, yang kemudian didiskusikan kembali dengan pembimbing untuk merevisi proposal, menyempurnakan outline skripsi dan mempertegas data yang akan diambil di lapangan. Atas dasar itu, peneliti kemudian mengurus Surat Izin Penelitian ke Dekanat pada tanggal 3 Oktober 2025, dan secara resmi memulai kegiatan pengumpulan data di lapangan pada 6 Oktober 2025.

Memasuki fase pengumpulan data pasca-disetujuinya proposal, penelitian ini langsung menyelami realitas ekonomi-budaya di tepian Danau Maninjau. Pada 10 Oktober 2025, peneliti memulai investigasi lapangan dengan mewawancara informan SNR dan HDP, untuk mengupas salah satu mata pencarian tradisional

alternatif: *Mamukek*. Tidak hanya berhenti pada wawancara, peneliti melakukan observasi partisipasi dengan membantu praktik *mamukek* di danau. Pendekatan immersif ini tidak sekadar mengumpulkan narasi, tetapi juga merasakan langsung denyut nadi dan tantangan dari sebuah tradisi yang berhadapan dengan modernitas.

Perjalanan kemudian bergeser ke wajah modern perekonomian danau. Pada 14 Oktober, peneliti mendatangi Keramba Jaring Apung (KJA) dan mewawancarai pemiliknya, NS dan DM. Hasil wawancara mengonfirmasi sebuah ketergantungan vital, bahwa KJA adalah penopang utama perekonomian mereka. Realitas ini memunculkan paradigma kritis di balik geliat ekonomi, yaitu ketergantungan monokultur pada satu sistem budidaya yang rentan. Kompleksitas ini semakin terlihat ketika pada 17 Oktober, peneliti mewawancarai informan A, yang justru terlibat dalam program Mata pencaharian Alternatif (MPA), namun di saat bersamaan tetap menjalankan KJA.

Untuk melengkapi perspektif dari hulu kebijakan, peneliti kemudian beralih ke ranah pemerintah. Pada 22 Oktober, kunjungan dilakukan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Agam untuk mewawancarai MDY dan DE. Di sinilah tantangan birokrasi menghadang. Untuk mendapatkan data strategis seperti jumlah KJA dan total produksi ikan, peneliti diharuskan mengurus izin formal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Prosedur ini memaksa peneliti untuk mundur sejenak untuk mengurus surat izin resmi dari dekanat fakultas yang baru keluar pada 28 Oktober.

Demi membangun peta yang komprehensif tentang dinamika sosial-ekonomi di Nagari Tanjung Sani, peneliti kemudian bergerak menuju jantung pemerintahan lokal. Pada 29 Oktober 2025, kunjungan ke Kantor Wali Nagari dilakukan untuk mengumpulkan data profil nagari serta informasi terkait program Mata Pencaharian Alternatif (MPA) dan skema bantuan pemerintah. Wawancara dengan RB, seorang perangkat nagari, tidak hanya memberikan data administratif tetapi juga membuka jalan bagi teknik snowball sampling yang berharga. Melalui rekomendasinya, peneliti diarahkan untuk bertemu dengan AR, seorang figur kunci yang memiliki perspektif ganda: sebagai penerima bantuan mata pencaharian alternatif sekaligus Ketua Kelompok Nelayan Tangkap. Wawancara dengan RZ menjadi jembatan penting untuk memahami celah antara kebijakan yang dirancang di tingkat nagari dengan realitas penerimanya di lapangan.

Guna menangkap nuansa keberagaman ekonomi yang tidak monokultur pada KJA, peneliti secara aktif menelusuri jejaring pelaku usaha alternatif. Kembali mewawancarai DM, fokus diperlakukan tidak hanya pada KJA, tetapi juga pada diversifikasi usahanya di bidang pembibitan, UMKM dan penangkapan udang. Dari sini, kembali metode snowball sampling membawa hasil yang luar biasa. DM merekomendasikan F (76), seorang sesepuh yang telah menjadi legenda hidup dan ensiklopedia berjalan bagi tradisi *mamukek*. Bertemu dengan F bukan sekadar mewawancarai seorang informan, melainkan menyelami langsung arsip pengetahuan lokal yang masih hidup dan praktik. Di usianya yang lanjut, ketangguhan F tetap *mamukek* menjadi simbol ketahanan dan nilai kultural yang melekat pada sebuah mata pencaharian tradisional, sekaligus memberikan

perspektif temporal yang dalam tentang perubahan ekosistem dan mata pencaharian di Danau Maninjau dari masa ke masa.

Dengan peta mata pencaharian alternatif yang mulai terbentuk, peneliti melanjutkan eksplorasi pada 2 November 2025 dengan menyelami sektor peternakan. Pertemuan dengan L, pengurus kelompok peternak ayam Sigiran Jaya Farm di tepi danau, menjadi bukti nyata diversifikasi ekonomi yang tidak hanya mengandalkan akuakultur. Wawancara dan observasi di lokasi usaha mengungkap dinamika lain: bagaimana bantuan dan pelatihan dari pemerintah direspon dan diimplementasikan oleh komunitas serta bagaimana sektor peternakan berinteraksi dengan ekosistem sensitif Danau Maninjau. Untuk melengkapi mozaik ketahanan ekonomi masyarakat, penelitian kemudian bergeser ke sektor agraris. Mengikuti petunjuk masyarakat, peneliti bergerak ke Jorong Pandan, yang dikenal sebagai kantong petani sukses. Di sana, pertemuan dengan MR, selaku Ketua Kelompok Tani, menjadi kunci untuk memahami struktur, tantangan dan pola-pola pertanian yang mampu bertahan dan berkembang di tengah dominasi wacana perikanan. Wawancara ini melengkapi trilogi mata pencaharian yaitu perikanan, peternakan dan pertanian yang bersama-sama membentuk sebuah gambaran yang lebih holistik dan kompleks tentang strategi survival komunitas di sekitar danau.

Pada tanggal 4 November 2025, peneliti melanjutkan proses pengumpulan data dengan melakukan serangkaian wawancara lanjutan yang difokuskan untuk validasi temuan awal dan memperkaya perspektif dari tingkat masyarakat. Tahap ini merupakan bagian integral dari strategi triangulasi sumber untuk memastikan

kredibilitas dan kedalaman data. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan seorang informan kunci A, yang merupakan ahli atau pelaku langsung yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika Danau Maninjau dan operasional Keramba Jaring Apung (KJA). Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang holistik peneliti bergerak untuk mewawancarai tiga informan biasa dari kalangan masyarakat, yaitu MY, DAP dan RA. Pemilihan informan-informan ini didasarkan pada kriteria bahwa mereka adalah warga biasa yang tinggal di sekeliling kawasan danau dan menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menangkap persepsi, pengalaman hidup dan rasionalitas lokal yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara dengan informan formal saja, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan kontekstual.

Dengan terkumpulnya data yang kaya dan berlapis dari berbagai lini masyarakat, tahap pengumpulan data kemudian ditekunkan. Peneliti beralih dari lapangan ke meja kerja, memulai proses analitis yang ketat untuk menyusun temuan-temuan tersebut menjadi sebuah narasi koheren dalam skripsi, mentransformasikan suara-suara para informan menjadi sebuah diskusi akademik yang kritis dan berbasis bukti.